



**DAKWAH STRUKTURAL HABIB ALI ALWI BIN THOHIR
SEBAGAI WAKIL RAKYAT PADA PARLEMEN PEMERINTAHAN**

M.Iqbal Dewantara, Sayyid Ali Zainal Abidin B.T

Institut Agama Islam Darullughah Wadda 'wah Bangil Pasuruan

E-mail: dewantara13@gmail.com

Submission	Revision	Publication
Februari, 19 th 2021	Maret, 23 th 2021	April, 30 th 2021

Abstrak

Dakwah merupakan yang gerakan ini tidak lain bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang beriman, bertakwa dan sejahtera. Teknik ataupun seni dalam penyampaian dakwah dapat berupa metode pendekatan-pendekatan struktural maupun kultural. Kedua pendekatan tersebut diibaratkan sebagai dua pasang kaki dan tangan yang saling menyempurnakan. Pendekatan struktural merupakan pendekatan dakwah dengan memanfaatkan kekuatan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kiprah dakwah dalam birokrasi yang dilakukan oleh Drs Habib Ali Alwi merupakan sebuah proses pentransferan nilai-nilai ajaran Islam dengan cara memanfaatkan profesi pekerjaan. Menanamkan pemahaman bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin bagi kalangan birokrat adalah tujuan utamanya. Sehingga dapat tercipta birokrat-birokrat yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai ke Islaman pada setiap kebijakan yang lahir.

Kata Kunci: *Dakwah Struktural, wakil rakyat, metoda dakwah, pemerintahan*

Pendahuluan

Rasulullah mulai menggunakan pendekatan dakwah secara terbuka atau terang-terangan kepada masyarakat Arab saat itu. Dengan tujuan semakin menyebarkan ajaran Islam. Jalan yang dipilih Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan, tidak semudah dan selancar seperti apa yang dibayangkan. Hal itu terlihat ketika segala macam usaha dilakukan oleh kafir Quraisy, agar menghentikan dakwah Rasulullah. Mulai dari melontarkan tuduhan-tuduhan palsu

, ejekan sindiran, bahkan mereka juga mengancam akan memerangi Rasulullah, keluarga dekat dan sahabat Rasul pun mendapat ancaman-ancaman tersebut.

Seseorang yang profesional di bidang dakwah dituntut mengerti cara komunikasi penyampaian dakwah yang baik. Agar dakwah terarah memerlukan proses tahapan¹. Mereka dikenal dengan sebutan da'i atau mubaligh. Dalam hal ini Allah SWT. telah menjelaskan tentang kewajiban berdakwah bagi sekelompok orang untuk menyerukan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam al-Qur'an, Allah berfirman:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S An-nahl :125)

Al-Quran surat An-nahl ayat 125 menerangkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia ke jalan Allah swt. Dengan cara bijaksana, nasehat yang baik, serta berdebat dengan baik pula. Ayat ini juga menjadi dasar hukum dakwa sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam. Kewajiban dakwah diperoleh dari ayat yang menjelaskan perintah dakwah, sebab dalam ilmu kaidah ushul fiqih, kalimat perintah menunjukkan kewajiban (al-Ashl fial-amr lial-wujub).

Penyampaian dakwah formal dan secara tidak formal ini yang sudah berlangsung lama dikhalayak Islam. Dakwah menjadi anjuran dalam beragama karena nilai positif². Ajaran Islam tidak formal selama ini yang dikenal di masyarakat selalu disampaikan melalui mimbar dan menggunakan penguat suara. Saluran penyampaian dakwah structural dengan komunikasi vertical dan horizontal. Justru dengan kondisi yang tidak formal ajakan dalam kebaikan akan mudah diterima dan lebih terkesan bagi mad'u atau sasaran dakwah. Berdakwah merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan kampanye, propaganda dan lainnya. Sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab yang

¹ Bustanol Arifin, “Strategi Komunikasi Dakwah Da'i Hidayatullah dalam Membina Masyarakat Pedesaan,” *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 2, no. 2 (June 25, 2019): 161, <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.4940>.

² Usfiyatul Marfu'ah, “STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH BERBASIS MULTIKULTURAL,” *Islamic Communication Journal* 2, no. 2 (January 25, 2018): 149, <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>.

dikutip oleh Abdul Basit bahwa dakwah merupakan perkara yang wajib bagi setiap individu, tetapi mesti ada sebuah organisasi ataupun kelompok yang mengambil bagian dalam dakwah secara khusus. Sedangkan kewajiban dakwah untuk setiap individu adalah sebatas *wa tawashau bi al-haq wa tawashau bi al-shabr*.

Pada dasarnya semua bidang kehidupan bisa dijadikan arena dakwah dan seluruh kehidupan manusia dapat digunakan sebagai sarana alat dakwah. Kegiatan politik, sebagaimana halnya dengan kegiatan ekonomi, usaha-usaha sosial, gerakan-gerakan budaya, kegiatan-kegiatan iptek, kreasi seni serta kodifikasi hukum, seharusnya menjadi media dakwah bagi setiap muslim. Dakwah yang tidak tepat dapat menimbulkan informasi yang tidak mewakili Islam sesungguhnya³.

Proses dakwah instansi atau lembaga ini menurut peneliti sangatlah menarik untuk dikaji. Seorang pemimpin dalam dakwahnya harus memiliki kompetensi dasar mengdiagnosis, mengadaptasi, dan mengkomunikasikan⁴. Seorang pendakwah yang terjun ke dalam lembaga politik mereka biasanya akan mendapatkan perhatian lebih baik dari golongan masyarakat dalam ranah pemerintahan. Kali ini peneliti ingin lebih jauh melihat bagaimana struktural dakwah dalam dua lembaga berbeda yang diperankan oleh salah satu tokoh agama yang berstatus sebagai pendakwah dan politisi. Beliau adalah salah satu wakil rakyat yang menduduki jabatan sebagai dewan perwakilan daerah (DPD) yaitu Habib Ali bin Alwi bin Husein Bin Tohir.

Kajian Literatur

Teori Dramaturgi Erving Goffman menjelaskan bahwa perbuatan manusia seperti di atas panggung drama⁵. Ada bagian panggung dan balik layar. Setiap orang adalah sosok yang memainkan perannya dalam kehidupan.

³ Icol Dianto, "PERANAN DAKWAH DALAM PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM," *Hikmah* 12, no. 1 (August 8, 2018): 100, <https://doi.org/10.24952/hik.v12i1.854>.

⁴ Evi Zahara, "PERANAN KOMUNIKASI ORGANISASI BAGI PIMPINAN ORGANISASI," 2018, 8.

⁵ Uwes Fatoni and Annisa Nafisah Rais, "Pengelolaan Kesan Da'i dalam Kegiatan Dakwah Pemuda Hijrah," n.d., 215.

Interaksi antar manusia saling memberikan pengaruh. Tindakan satu sama lain saat berhadapan fisik tatap muka. Actor adalah sosok yang menjalankan peran sebagai Tindakan yang terus menerus dilakukan dalam penampilannya. Teori ini diterapkan dalam dakwah struktural. Seseorang yang memiliki posisi struktural tertentu memainkan perannya dalam posisi tersebut. Iklim komunikasi sebagai perilaku dalam organisasi memberikan pengaruh besar bagi pencapaian dakwah pada structural organisasi⁶.

Pembahasan tentang dakwah struktural haruslah dimulai dengan perbincangan hubungan antara agama (din) dan negara (dawlah). Pada hakikatnya, negara adalah suatu wadah, dimana manusia bebas berkarya sebagai Khalifah Allah dan hidup secara damai dan sejahtera untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Mohamad Tarmimie Bin Mazlan berpendapat dalam karya ilmiahnya. Ramli Ridwan menyampaikan bahwa dakwah struktural merupakan aktifitas yang dilakukan pemerintah atau suatu kenegaraan dengan berbagai strukturnya. Negara membangun suatu tatanan masyarakat yang menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah dalam lingkup amar ma'ruf nahi mungkar.

Pemerintah mengatur aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya yang berdasarkan nilai agama. Hal ini merupakan aktivitas dakwah struktural. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dakwah struktural adalah pendekatan dakwah Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi agar bernilai Islam dan terimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Muhammad Sulthon, dakwah dapat dikategorisasikan berdasarkan dua pendekatan, pendekatan struktural dan kultural, Bentuk komunikasi politik yang dipraktekkan oleh komunikator infrastruktur dapat mengantarkan pada capaian tujuan politiknya⁷

⁶ Dede Irawan and Antar Venus, "PENGARUH IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KELUARGA BERENCANA JAKARTA BARAT," *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 126.

⁷ Sukron Mazid and Kuswan Hadji, "MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT" 3 (n.d.): 4.

keterampilan masyarakat perlu adanya pengembangan sehingga ada komunikasi yang baik pemerintah dengan masyarakat⁸.

Sesuatu dapat dikategorisasikan sebagai dakwah struktural jika betul-betul berdakwah secara intensif mengupayakan ajaran Islam diungkapkan pada struktur pemerintah. Untuk itu, kecenderungan dakwah ini sering kali mengambil bentuk dan masuk kedalam kekuasaan, terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta bentuk-bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya. Dengan demikian aktifitas dakwah perlu dikembangkan di segala aspek kehidupan memanfaatkan struktur sosial, politik, ekonomi maupun lainnya⁹. Istilah dakwah dalam kitab suci AL Qur'an ditemukan 198 kali¹⁰.

Sedangkan dakwah struktural menurut Siti Fatimah, adalah dakwah yang memanfaatkan susunan, jabatan, kepangkatan dari dai atau mad'u. Struktur biasanya berkaitan erat dengan kepemimpinan. Dilihat dari pendekatan struktural ini, semua rasul menggunakan pendekatan struktural karena mereka semua adalah seorang raja atau pimpinan negara atau kelompok. Peran ganda Rasul adalah sebagai pembawa risalah kepada masyarakat luas dan juga sebagai kepala negara (pemimpin bangsa). Keperibadian, sebagai pemimpin nampak pada perilaku yang senantiasa mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan Allah.

Prinsip Dakwah struktural itu sendiri adalah dakwah Islam yang berusaha mewujudkan negara dan bangsa yang berdasarkan Islam, para perilaku politik menunjang tinggi nilai-nilai keislaman dalam perilaku politik mereka dan serta penegakan. Strategi dakwah struktural merupakan strategi dakwah melalui jalur kekuasaan. Menurut Kunto Wijoyo, disebut strategi struktural jika kegiatan dakwah tersebut harus memakai struktur teknis berupa lembaga-lembaga negara, birokrasi dan partai-partai yang kesemua usahanya

⁸ Mazid and Hadji, 5.

⁹ Efa Rubawati, "Media Baru: Tantangan dan Peluang Dakwah," *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 1 (March 1, 2018): 137, <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.586>.

¹⁰ Syahrudin Syahrudin, "Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo," *LENTERA*, June 27, 2020, 64, <https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2050>.

mengarah kepada pengambilan keputusan politik untuk kepentingan

dakwah Islamiyah. Strategi merupakan hal yang sangat penting , karena sebuah tujuan tidak mudah tercapai tanpa adanya strategi yang strategis. Adapun teknik, taktik dan tata cara merupakan sebuah cara yang digunakan dan merupakan bagian dari strategi itu sendiri. Strategi yang disusun, dikonsentrasikan dan dikonsepsikan dengan baik dapat membuahkan pelaksanaan yang disebut strategi. Metoda dakwah yang diambil dalam AL Qur'an diantaranya metode dakwah komparatif, membandingkan baik dan buruk¹¹.

Menurut teori dakwah struktural, negara dianggap sebagai media yang cukup strategis dalam kegiatan dakwah. Dakwah struktural merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai perangkatnya untuk membangun tatanan masyarakat sesuai dengan ajaran agama. Strategi dakwah struktural mengambil bentuk dan masuk dalam kekuasaan dengan terlibat dalam proses eksekutif, yudikatif, dan legislatif serta bentuk- bentuk struktur sosial kenegaraan lainnya. Sehingga negara dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan dakwah. Ada tiga paradigma dalam dakwah struktural antara islam, politik dan negara¹².

Menurut Tata Sukayat, dalam melaksanakan dakwah struktural melalui kebijakan publik setidaknya memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Nilai-nilai keagamaan terumuskan dalam bentuk nilai yang konkret dan universal.
- b. Faktor kemanfaatan dan kemaslahatan umum menjadi fokus utama internalisasi nilai.
- c. Problematika yang ada di sekitar ruang publik menjadi landasan dalam penentuan nilai yang diinternalisasikan, kemudian dikemas sesuai dengan tingkat penerimaan publik sehingga dapat diterima dengan baik.
- d. Nilai agama terumuskan dalam bentuk tujuan, sarana, dan aksi yang jelas serta bersifat universal sehingga dapat diaplikasikan pada kebijakan

¹¹ Syahrudin, 6.

¹² Syahrudin, 66.

publik.

Aktivitas dakwah dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila yang menjadi tujuan benar-benar dapat tercapai dengan baik. Salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan dakwah tersebut adalah melalui konsep manajemen dakwah yang baik. Strategi yang didukung dengan metode yang bagus dan pelaksanaan program yang akurat akan menjadikan aktifitas dakwah menjadi matang dan berorientasi jelas. Komponen dakwah seperti da'i, mad'u, materi, media, dan metode jika dikelola dengan menggunakan ilmu manajemen, maka aktifitas dakwah akan berlangsung dengan terarah.

Manajemen dakwah terdiri dari beberapa unsur seperti perencanaan strategi, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan serta evaluasi. Perencanaan merupakan langkah awal dari aktifitas manajemen dakwah. Secara umum, perencanaan membantu untuk menghindari penundaan-penundaan yang disebabkan oleh kegagalan melaksanakan suatu tindakan dan upaya untuk kembali mengambil langkah yang tepat sedini mungkin atas kegagalan tersebut. Di samping itu, perencanaan juga dapat membantu dalam mengestimasi biaya dari strategi atau pendekatan yang dilakukan.

Sebelum melaksanakan perencanaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti hasil atau *output* dakwah yang ingin dicapai, siapa da'i yang akan berdakwah, waktu dan skala prioritas, serta biaya yang diperlukan. Pola komunikasi yang diterapkan dalam suatu struktur keorganisasian ada dua macam. komunikasi dari atas ke bawah (*downward communication*); jika proses komunikasinya terjadi dari bagian paling rendah kepada posisi yang lebih tinggi secara struktur, maka itu merupakan komunikasi dari bawah ke atas (*upward communication*)¹³. Pelaksanaan dakwah dapat dilakukan secara organisasi atau berkelompok¹⁴. Bukan hanya perorangan walau tanggung jawab dakwah menunjuk pada setiap individu.

Dakwah memiliki unsur-unsur, mulai dari pemberi pesan dakwah sampai

¹³ Faisal Muzzammil, "KOMUNIKASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA (Studi Kasus Tentang Komunikasi Internal Pada Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat)," *KOMUNIKA* 3, no. 1 (June 30, 2020): 54, <https://doi.org/10.24042/komunika.v3i1.6050>.

¹⁴ Muslimin Ritonga, "Komunikasi Dakwah Zaman Milenial" 3, no. 1 (2019): 67.

metoda dan efeknya.¹⁵ . sebagai pelaku dakwah Islamiyah untuk menghidupkan dakwah harus mampu berdialog. Pendekatan dakwah berdasarkan budaya masyarakat. Peradaban yang berkembang di suatu daerah lokasi dakwah. Posisi structural yang dimiliki mampu mengisi materi dakwah dengan substansi dan nuansa islami melalui program dan kebijakan yang dibentuk. Hal ini bisa diterapkan hanya jika mampu memahami pergerakan zaman yang benar agar tidak tertinggal keadaan masyarakat terkini. Dakwah structural bukan untuk tujuan Gerakan Islam yang transnasional¹⁶. Gerakan semacam ini telah meresahkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif pada mulanya bersumber pada pengamatan dan memiliki peredaan dengan kuantitatif. Sehingga metodologi kualitatif didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam keasaannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif memiliki ciri atau karakteristik yang membedakan dengan jenis penelitian lainnya. Penelitian kualitatif tidak menguji suatu hipotesis¹⁷. Organisasi memiliki tugas tidak hanya mengartikan informasi dan komunikasi yang diterima, tetapi memiliki tantangan menentukan informasi tersampaikan kepada siapa yang layak menerima informasi agar tercapai tujuan dari struktural.

Sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian mutlak diperlukan sebagai instrumen utama. kegiatan dalam analisis data kualitatif diterapkan kontinyu terus

¹⁵ Ritonga, 68.

¹⁶ Nur Wahid, "JEJAK DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) MEMASUKI MUHAMMADIYAH: Mencermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah," *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 2 (December 21, 2019): 184, <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132-08>.

¹⁷ Dian Ramadani, Puji Lestari, and Muhammad Edy Susilo, "Audit Komunikasi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta," *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 4 (January 18, 2015): 4, <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i4.78>.

menerus. Komunikasi yang interaktif dan mendalam¹⁸. Dakwah secara terminology sebagai perubahan perilaku individu dengan komunikasi¹⁹. Peneliti berperan sebagai pengamat partisipan, dimana secara terbuka diketahui oleh subyek, sedangkan sebaliknya para subyek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Paradigma yang juga digunakan dalam penelitian. Paradigma interpretatif. Paradigma Interpretatif memiliki asumsi bahwa kehidupan sosial didasarkan pada interaksi sosial dan sistem makna sosial²⁰. Fungsi komunikasi organisasi perlu dibedakan antara organisasi profit dan non profit²¹. Komunikasi yang diterapkan dapat menyesuaikan pada bentuk organisasinya.

Data Primer merupakan data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung kepada sumber utamanya. Data masih mentah dan perlu analisa lanjut. Peneliti langsung bersinggungan dengan para narasumber untuk menggali kedalaman informasi dan kelengkapan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jenis data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber data melalui wawancara, observasi, atau dengan cara yang lainnya.

No	Nama Informan	Umur	Keterangan
1	Habib Ali	54	Dewan Perwakilan Daerah

¹⁸ M. Alfin Fatikh and Redi Panuju, "KOMUNIKASI ORGANISASI KEHUMASAN POLRES PASURUAN," *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 1 (February 28, 2018): 27, <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.8>.

¹⁹ Muslimin Muslimin, "DAKWAH STRUKTURAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II," *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 5, no. 1 (June 30, 2021): 2, <https://doi.org/10.19109/jkpi.v5i1.9028>.

²⁰ Rara Ayu Mulia Murti, Martha Tri Lestari, and Dini Salmiyah Fithrah Ali, "KOMUNIKASI ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) AREA BANDUNG DALAM KEGIATAN CODE OF CONDUCT," *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (December 28, 2017): 214, <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8487>.

²¹ Fatikh and Panuju, "KOMUNIKASI ORGANISASI KEHUMASAN POLRES PASURUAN," 26.

2	Sayyid Muhammad Husein	27	Putra
3	Suasdi Nurhidayat	37	Staf
4	Nana Supriyatna	33	Staf

Kajian penelitian kualitatif banyak ragamnya dan tersebar berbagai bidang di rumpun ilmu sosial. Kondisi saat ini belum adanya koordinasi baku dari banyak ahli. Penelitian kualitatif bermula dari kelompok ahli sosiologi pada tahun 1920-1930²². Memberikan pemahaman yang yakin dalam memahami tentang kehidupan manusia. Saat yang bersamaan kelompok ahli antropologi memberikan gambaran sistematis suatu metode karya lapangan. Metode dengan pengamatan langsung ke lokasi penelitian mempelajari gerak hidup manusia. Peneliti mempelajari dan mengamati adat dan istiadat budaya. Reaksi dari tradisi berupaya dalam kajian budaya.

Penelitian kualitatif sampai saat ini masih sangat relevan. Kendala sederhana bagi peneliti kualitatif adalah adaptasi di lingkungan tempat penelitian. Peneliti kualitatif akan memetakan dan mengamati secara rinci segala sesuatu yang ada di lokasi penelitian. Tahapan pertama adalah pengamatan atau observasi. Pada tahap ini masih pemetaan informasi secara umum. Peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan pendalaman pertanyaan. Tahap kedua pada penelitian kualitatif adalah tahap reduksi. Informasi yang banyak di tahap pertama direduksi untuk memampatkan informasi yang paling dibutuhkan untuk memfokuskan masalah tertentu. Peneliti memilah dan memilih informasi. Data yang tidak dipakai disingkirkan. Selanjutnya data dikelompokkan menjadi berbagai katagori dan pengkodean tertentu untuk memudahkan akses data saat digunakan. Tahap selection peneliti menguraikan fokus yang lebih rinci.

²² Tata Sukayat, "INTERNALISASI NILAI ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)," no. 1 (2015): 15.

Hasil dan Pembahasan

Habib Ali Alwi bin Thohir lahir di desa Hitu kabupaten Maluku Tengah kecamatan Leihitu pada tanggal 2 September 1966. Beliau merupakan putra ke 6 dari 7 bersaudara pasangan dari Habib Alwi bin Husein bin Thohir dan Anawiyah binti Utsman, ayahnya seorang pengusaha swasta yang sukses saat itu, dan yang lebih istimewa adalah Habib Ali Alwi bin Thohir adalah keturunan ke-6 dari seorang ulama besar di Hadramaut Yaman, al-Imam al-Qutubul Irsyad Al-Habib Abdullah Bin Husein bin Thohir, yang bergelar "*Dua Pemilik Lautan Ilmu Lahir maupun Batin*" dan juga pengarang kitab salaf, Sulam at-Taufik yang menjadi rujukan di Pondok-pondok Pesantren di Indonesia termasuk di Pondok Pesantren Modern al-Husainyyang dipimpinnya saat ini.

Penggalian informasi melalui sejarah secara heuristik²³. Pada Era Reformasi tahun 1998, diawali dari ajakan Abdurrahman Wahid untuk bergabung bersma Partai Kebangkitan Bangsa yang ia dirikan, maka Habib Ali pun bergabung untuk membesarkan partai yang menjadi sayap politik kaum Nahdliyin tersebut dan dipilih menjadi Ketua Tanfidziah PKB Kabupaten Tangerang. Pada tahun 1999, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang periode 1999-2004. Kemudian pada tahun 2004, ia terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten periode 2004-2008 dari daerah pemilihan Kabupaten Tangerang.

Pada tahun 2009, Habib Ali terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari daerah pemilihan Kota Tangerang Saat ini, Habib Ali menjabat sebagai senator yang mewakili Provinsi Banten di kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019 serta pernah menjabat sebagai ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI.

²³ Alfian Arifuddin and Syarif Ahmad Muzammil, "Strategi Komunikasi Dakwah Struktural Kesultanan Kadriyah Di Pontianak," *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (October 8, 2020): 10, <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v3i2.368>.

Habib Ali yang dalam status dirinya sebagai calon legislatif adalah seorang kyai/pengasuh pesantren (tokoh dakwah) yang secara sadar dan yakin bahwa keterlibatan dirinya dalam politik merupakan tugas dakwah yang disadarinya. Hal itu disampaikannya dalam pernyataan secara tertulis. menjadi politisi jujur, adil, amanah dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Serta akan merubah pandangan orang tentang “politik itu kotor” dan maraknya “money politic (politik uang)” yang sudah dianggap sebagai “cost politik (biaya politik)”. Secara gamblang dan transparan Habib Ali menyampaikan kalimat tersebut, dalam kesempatan dirinya sebagai calon legislatif.

Dalam perannya sebagai seorang pengasuh Pondok Pesantren, Habib Ali tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain bahkan pada para santrinya dalam pencalonan dirinya sebagai anggota legislatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Habib Ali, bahwa: Dalam berpolitik beliau tidak terlalu fanatik buta, tidak mengekang, bahkan kepada para muridnya sendiri pun Habib berlaku demokratis dengan memberi kesempatan para murid untuk menentukan sikap politik. Politik itu adalah hak individu dan orang lain tidak boleh mempengaruhi sebuah pilihan politik seseorang, apalagi menekan dengan berbagai dalil yang dikeluarkan.

Peneliti mendapatkan keselarasan dengan metode pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Habib Ali. Terutama dengan pemahaman dan pengaplikasian Habib Ali mengenai dakwah struktural. Menurut Habib Ali, dalam sebuah kekuasaan negara sudah tentu terdapat struktur institusinya. Untuk itulah diperlukan seorang da'i masuk ke dalam struktur institusi itu, Melalui struktur inilah diharapkan seorang da'i bisa lebih dekat dengan pemimpin. Sedangkan untuk masuk dan dekat dengan posisi pimpinan kekuasaan, dibutuhkan keunggulan kapasitas dan integritas diri. Sehingga akhirnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penyebaran dakwah Islam.

Keyakinannya berdakwah di lingkungan pemerintahan ketika itu ternyata menguntungkan secara politis. Politis di sini tidak diartikan sebagai politik partai. Akan tetapi keuntungan politis di sini adalah keuntungan

berkaitan dengan seni memengaruhi kebijakan, sehingga dapat memasukan unsur atau nilai-nilai ke Islam. Seperti halnya ketika Habib Ali aktif di lingkungan dakwah. Keuntungan sebagai seorang Da'i ketika mengemban tugas dari pemerintahan adalah terjalinnya hubungan yang sangat dekat dengan masyarakat, di satu sisi menjadi pendakwah pasti sangat dekat dengan masyarakat, kemudian seorang pendakwah bisa mendapatkan antusias yang sangat banyak dari kalangan masyarakat terutama mereka yang berada dalam lingkungan pesantren. Dakwah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai islami dalam kehidupan masyarakat. Berbagai bidang kehidupan dapat direalisasikan nilai-nilai Islam melalui Gerakan dakwah. Struktural identik dengan partisipasi politik²⁴. pergerakan memanfaatkan posisi di struktur mana pun tidak hanya pemerintahan yang biasanya berhubungan dengan negara. Dakwah structural juga perlu memperhatikan kultural, partisipasi keagamaan yang berhubungan dengan perilaku dan sikap individu mengimplementasikan nilai agama dalam kehidupannya.

Kekuatan struktur institusi inilah dirinya bisa leluasa berdakwah di dalam maupun luar institusi kalangan pesantren. Kekuatan struktur yang Habib Ali miliki juga membawa beliau sampai dunia perpolitikan, sampai akhinya beliau di tempat yang sangat membutuhkan sekali seperti sosok beliau. Posisinya sebagai wakil ketua dewan perwakilan daerah (DPD) provinsi Banten mempunyai nilai tambah dan memungkinkan Habib Ali untuk memasukan unsur-unsur dakwah dalam setiap kegiatan presiden. Sehingga dirinya betul-betul memanfaatkan kedekatan struktural ini. Hal ini tercermin pada tugas pokok dirinya sebagai wakil ketua. Contohnya selalu mengatur jadwal kegiatan kunjungan dan acara lainnya yang tidak mengganggu jadwal sholat lima waktu, membuat konsep dan naskah pidato keagamaan, membuat jadwal pertemuan dan silaturahmi dengan para ulama, membuat dan merencanakan acara keagamaan di lingkup istana. Membiasakan sambutan kunjungan Presiden dengan iringan hadroh.

²⁴ Farhan Farhan, "BAHASA DAKWAH STRUKTURAL DAN KULTURAL DA'I DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2014): 6, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/162>.

Membuat jadwal berbuka puasa bersama para Menteri Kabinet secara rutin. Contoh di atas adalah cerminan dari Pemanfaatan Struktur Institusi sebagai media menyampaikan dakwah yang efektif.

Penutup

Dakwah struktural punya peran strategis dalam tujuan perubahan nilai Islam ke ruang khalayak ramai²⁵. Konteks ke Indonesiaan dapat diwadahi dengan alternatif dakwah struktural. Dakwah perlu di rebranding untuk memperkuat peran dakwah dalam organisasi²⁶. Dakwah secara akademik dipahami masyarakat juga dimaknai sebagai suatu kegiatan *missionaris*. Dakwah adalah objek kajian dalam keilmuan. Masa kini dakwah telah menjelma menjadi kegiatan sehari-hari. Berbagai bentuk dakwa seperti film yang dipertontonkan dan program kajian secara live di televisi maupun konten media sosial²⁷.

Kebijakan publik yang dimaksud adalah membangun ketertiban hukum. Aturan untuk khalayak ramai yang dibentuk sesuai persyaratan²⁸. Aturan dibentuk untuk mencapai kemajuan. Sehingga kebijakan publik yang mencapai kemajuan masyarakat dimaknai kebijakan publik yang membangun. Perumusan kebijakan publik menjadi tahap awal yang mendasar suatu perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Perubahan nilai agama yang dilakukan melalui kebijakan publik. Nilai agama ditransformasikan pada suatu kebijakan. Agama juga dapat mengalami perubahannya dengan transformasi langsung secara politis. Resiko dengan cara ini dapat membuka peluang konflik yang tinggi karena berpotensi memecah masyarakat di ruang publik. Perubahan dapat dilakukan pola yang terakhir. Modal sosial yang dijadikan kebijakan sesuai wilayah administrative. Pola yang mampu menggerakkan warga Bersama-sama

²⁵ Sukayat, "INTERNALISASI NILAI ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)," 88.

²⁶ Abdul Ghofur, "Dakwah Islam Di Era Milenial," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (August 25, 2019): 141, <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.405>.

²⁷ Abdul Basit, "Dakwah Cerdas di Era Modern," n.d., 3.

²⁸ Sukayat, "INTERNALISASI NILAI ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)," 11.

melakukan perubahan khususnya dalam hal yang baik dan kemajuan. Internalisasi dan perubahan nilai Islam dapat juga dilakukan dengan menjadikan Erika politik dengan nilai Islami. Islam mampu menjadi nilai yang mewarnai semua bidang aktifitas pemerintahan. Nilai Islami pun dapat menjadi dasar dari keseluruhan aktifitas politik masyarakat.

Referensi

- Arifin, Bustanol. "Strategi Komunikasi Dakwah Da'i Hidayatullah dalam Membina Masyarakat Pedesaan." *Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi* 2, no. 2 (June 25, 2019): 109–26. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.4940>.
- Arifuddin, Alfian, and Syarif Ahmad Muzammil. "Strategi Komunikasi Dakwah Struktural Kesultanan Kadriyah Di Pontianak." *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (October 8, 2020): 19–35. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v3i2.368>.
- Basit, Abdul. "Dakwah Cerdas di Era Modern," n.d., 19.
- Dianto, Icol. "PERANAN DAKWAH DALAM PROSES PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM." *Hikmah* 12, no. 1 (August 8, 2018): 90. <https://doi.org/10.24952/hik.v12i1.854>.
- Farhan, Farhan. "BAHASA DAKWAH STRUKTURAL DAN KULTURAL DA'I DALAM PERSPEKTIF DRAMATURGI." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2014). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/162>.
- Fatih, M. Alfin, and Redi Panuju. "KOMUNIKASI ORGANISASI KEHUMASAN POLRES PASURUAN." *Jurnal Riset Komunikasi* 1, no. 1 (February 28, 2018): 22–34. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.8>.
- Fatoni, Uwes, and Annisa Nafisah Rais. "Pengelolaan Kesan Da'i dalam Kegiatan Dakwah Pemuda Hijrah," n.d., 12.
- Ghofur, Abdul. "Dakwah Islam Di Era Milenial." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5, no. 2 (August 25, 2019): 136. <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i2.405>.
- Irawan, Dede, and Antar Venus. "PENGARUH IKLIM KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR KELUARGA BERENCANA JAKARTA BARAT." *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 2 (2016): 11.
- Marfu'ah, Usfiyatul. "STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH BERBASIS MULTIKULTURAL." *Islamic Communication Journal* 2, no. 2 (January 25, 2018): 147. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>.

- Mazid, Sukron, and Kuswan Hadji. "MODEL KOMUNIKASI POLITIK ANGGOTA DPRD DALAM UPAYA PENGUASAAN CIVIC SKILLS MASYARAKAT" 3 (n.d.): 14.
- Murti, Rara Ayu Mulia, Martha Tri Lestari, and Dini Salmiyah Fithrah Ali. "KOMUNIKASI ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) AREA BANDUNG DALAM KEGIATAN CODE OF CONDUCT." *Jurnal Kajian Komunikasi* 5, no. 2 (December 28, 2017): 210. <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8487>.
- Muslimin, Muslimin. "DAKWAH STRUKTURAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II." *Jurnal Komunikasi Islam Dan Kehumasan (JKPI)* 5, no. 1 (June 30, 2021): 13–29. <https://doi.org/10.19109/jkpi.v5i1.9028>.
- Muzzammil, Faisal. "KOMUNIKASI ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA (Studi Kasus Tentang Komunikasi Internal Pada Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat)." *KOMUNIKA* 3, no. 1 (June 30, 2020): 51–63. <https://doi.org/10.24042/komunika.v3i1.6050>.
- Ramadani, Dian, Puji Lestari, and Muhammad Edy Susilo. "Audit Komunikasi Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta." *Jurnal ASPIKOM* 2, no. 4 (January 18, 2015): 282. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i4.78>.
- Ritonga, Muslimin. "Komunikasi Dakwah Zaman Milenial" 3, no. 1 (2019): 18.
- Rubawati, Efa. "Media Baru: Tantangan dan Peluang Dakwah." *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)* 2, no. 1 (March 1, 2018). <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.586>.
- Sukayat, Tata. "INTERNALISASI NILAI ISLAM MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK (Studi terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)," no. 1 (2015): 24.
- Syahrudin, Syahrudin. "Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo." *LENTERA*, June 27, 2020. <https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2050>.
- Wahid, Nur. "JEJAK DAKWAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) MEMASUKI MUHAMMADIYAH: Mencermati Kasus di Yogyakarta sebagai Fenomena Politik Dakwah." *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 2 (December 21, 2019): 179. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.132-08>.
- Zahara, Evi. "PERANAN KOMUNIKASI ORGANISASI BAGI PIMPINAN ORGANISASI," 2018, 8.